

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Hernadi. "Implementasi Hak Atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: Antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara." *Jurnal Hukum Positum* 4, no. 1 (2019).
- Amalita, Anggun Riska, Alawiya, Nayla, dan Utami, Nurani Ajeng Tri. "Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Soedirman Law Review* 2, no. 1 (2020).
- Ananda, Tara Raf, Emilda Firdaus, dan Zulwisman. "Implementasi Pelayanan Kesehatan Jiwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan di Puskesmas Sail, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 10 (Oktober 2025).
- Ardinata, Mikro. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 11, no. 2 (Agustus 2020).
- Ayuningtyas, D., Misnaniarti, M., dan Rayhani, M. "Analisis Situasi Kesehatan Mental pada Masyarakat di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya." *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 9, no. 1 (2018).
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). 2023. Laporan Cakupan Layanan Kesehatan Mental. Jakarta: BPJS Kesehatan.
- Committee on Economic, Social and Cultural Rights. "CESCR General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)." United Nations Digital Library, 2000. Diakses 7 Desember 2021.
- Committee on Economic, Social and Cultural Rights. 1990. General Comment No. 3: The Nature of States Parties' Obligations (Art. 2, Para. 1, of the Covenant). Jenewa: United Nations.
- Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General Comment No. 3: The Nature of States Parties' Obligations (Art. 2, Para. 1 of the Covenant).

E/1991/23. 14 Desember 1990. Diakses 4 Maret 2026.  
<https://www.refworld.org/legal/general/cescr/1990/en/129827>.

Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12 of the Covenant). E/C.12/2000/4. 11 Agustus 2000. Diakses 4 Maret 2026.  
<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WRGS/Health/GC14.pdf>.

Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12 of the Covenant). E/C.12/2000/4. 11 Agustus 2000. Diakses 4 Maret 2026.  
<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WRGS/Health/GC14.pdf>.

Firdaus, Emilda, dan Zulwisman. “Pendahuluan: Kesehatan Jiwa sebagai Hak Asasi Manusia.” Dalam *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 10 (Oktober 2025): 53.

Fitriani, F. “Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Gangguan Jiwa di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Kesehatan* 6, no. 1 (2022): .

Ginting, Oskar Arifandi, Lubis, M. Yamin, dan Affan, Ibnu. “Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi COVID-19 Oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hak Konstitusional Warga Negara.” *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 2 (2021): .

Habeahan, R. O. P., Shaluhayah, Z., dkk. “Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Faktor yang Mempengaruhinya di Pusat Kesehatan Masyarakat: Literature Review.” *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)* 6, no. 6 (Juni 2023).

Hadi, Naufal Akbar Kusuma. “Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (29 Desember 2022).

Hidayati, N., dan Widyastuti, E. “Kesiapan Tenaga Kesehatan dalam Menangani Kasus Gangguan Jiwa.” *Jurnal Kesehatan Mental* 9, no. 2 (2021).

Huda, Ni'matul. *Hukum Kesehatan di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.

- Hukumonline, “Hukumnya Memasung Orang dengan Gangguan Jiwa”, 11 November 2025.
- Indriawan, Denny, Wahyudi, Setya, dan Handayani, Sri Wahyu. 2025. “Akses Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Mental: Studi Kasus Perlindungan Hukum di Indonesia.” *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 5 (1).
- Intania, Christina Clarissa. 2023. “*Analisis Hukum Pembentukan Undang-Undang Kesehatan dan Perbandingan Peraturan Profesi serta Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang Kesehatan.*” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Diadopsi 16 Desember 1966 oleh Resolusi Majelis Umum PBB 2200A (XXI). Berlaku 3 Januari 1976. 993 U.N.T.S. 3. Diakses 4 Maret 2026. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/cescr.pdf>.
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Diadopsi 16 Desember 1966 oleh Resolusi Majelis Umum PBB 2200A (XXI). Berlaku 3 Januari 1976. 993 U.N.T.S. 3.
- Iskandar, Hanifa Mutiarani, Divia Zunfriska Irawan, dan Mohammad Alvi Pratama. “Pemikiran John Locke tentang Hak Alamiah dan Masyarakat.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 3, no. 1 (Juni 2025).
- Jannah, Mau'izzatun, Lestari, Diana, Khairuman, Rahayu, Dian, Nurdin, Ambia, dan Sihaloho, Endang. 2024. “Perlindungan Hak Individu dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hak Asasi Manusia* 8 (3).
- Japar, Muhammad, Semendawai, Abdul Haris, Fahrudin, Muhammad, dan Hermanto. 2024. “Hukum Kesehatan dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum Internasional* 10 (4).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2023. Laporan Tahunan Kesehatan Mental Indonesia. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018. Jakarta: Kemenkes RI, 2020.

- Kementerian Kesehatan RI. “Transformasi Layanan Primer: Kesehatan Jiwa Ditekankan pada Program Promotif dan Preventif.” [Kemkes.go.id](https://www.kemkes.go.id), 2022. Diakses 5 Januari 2026. <https://www.kemkes.go.id/article/view/22101600001/transformasi-layanan-primer-kesehatan-jiwa-ditekankan-pada-program-promotif-preventif.html>.
- Kementerian Kesehatan RI. Infodatin Kesehatan Jiwa. 2018. Diakses 19 Januari 2026. <https://www.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-jk-2018.pdf>.
- Komalawati, Veronica, dan Alfarijah, Dina Aisyah. “Tanggung Jawab Orang Tua Atas Kesehatan Anak Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 2 (2020).
- Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD). 2006. Diadopsi oleh PBB dan diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.
- Kusumaningsih, Rila. 2023. “Kewajiban Pemerintah dalam Penyediaan Layanan Kesehatan Mental.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 9 (2).
- Luhukay, Roni Sulistyanto. 2024. “Hak Layanan Kesehatan Mental dalam Perspektif Hukum dan Konstitusi.” *Jurnal Hukum Konstitusi* 7 (1): 80-105.
- Maharani, T., Sari, R., dan Rahmawati, A. “Stigma Sosial terhadap Penderita Gangguan Jiwa: Tinjauan dari Perspektif Hukum.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 16, no. 3 (2022).
- Mardian, Y., dan Usman, A. “Perlindungan Hukum bagi Individu dengan Gangguan Jiwa di Indonesia.” *Jurnal Kebijakan Kesehatan* 11, no. 1 (2023).
- Mikhael, Lefri. “Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa dihubungkan dengan hak asasi manusia.” *Journal of Psychiatry* 13, no. 1 (April 2022).
- Mubarak, Asriullah Jabbar, Haryati, dan Iswara, Raja Al Fath Widya. *Pengantar Etika, Perilaku Dan Hukum Kesehatan*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2022.

- Muhtaj, Majda El. “Pemenuhan Hak Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar Ditinjau Dari UU No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa di Kota Medan (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan).” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024).
- Nurmala, Mulyana, Aji, dan Amalia, Mia. 2024. “*Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Mengenai Perlindungan Kesehatan Masyarakat.*” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952).
- Pratama, Mohammad Alvi. “Abstrak: Kontrak Sosial Locke dan Hak Alamiah.” Dalam Nusantra: *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 3, no. 1 (Juni 2025): 2.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXI/2023.
- Ramadhana, Fisca Amanda. “Gangguan Jiwa sebagai Masalah Kesehatan Utama di Indonesia.” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024): 15258.
- Ridlo, I. A. “Pandemi COVID-19 dan Tantangan Kebijakan Kesehatan Mental di Indonesia.” *INSAN Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental* 5, no. 2 (2020): 155–164. <https://doi.org/10.20473/jpkm.v5i12020.155-164>.
- Ridlo, I. A., dan Zein, R. A. “Arah Kebijakan Kesehatan Mental: Tren Global dan Nasional Serta Tantangan Aktual.” *Buletin Penelitian Kesehatan* 46, no. 1 (2018): 45–52. <https://doi.org/10.22435/bpk.v46i1.56>.
- Rusmanda, Rafi Caesario. “Pemikiran John Locke tentang Hak Alamiah dan Masyarakat.” *Nusantra: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 3, no. 1 (Juni 2025): 1–25.

- Sari, O. K., Ramdhani, N., dan Subandi, S. "Kesehatan Mental di Era Digital: Peluang Pengembangan Layanan Profesional Psikolog." *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan* 30, no. 4 (2020).
- Syafi'ie, M., Heryansyah, D., Reza, F., dan Dey, N. "Implications of Constitutional Court Decisions on The Protection of The Voting Rights of Persons with Mental Disabilities: (Study in Bali Province and Special Region of Yogyakarta)." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (27 Desember 2022): 149–164. <https://doi.org/10.25217/jm.v7i2.2838>.
- Tangke, Yunita. 2023. "Hubungan Kesehatan Mental Remaja dengan Kondisi Sosial." Skripsi, Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Ticoalu, Sartika Sasmi. "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat." *Lex et Societatis* 1, no. 5 (2013).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (3). Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 1 Ayat (1)–(3), Pasal 4 Ayat (1) Huruf (c), Pasal 77 Ayat (1)–(3). Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Pasal 1 Ayat (3)–(4). Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2014.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 42. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 1999.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Wahyudi, Setya, dan Sri Wahyu Handayani. "Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (2025).

Wicaksono, Emirza Nur. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Orang dengan Gangguan Jiwa yang Terlibat Tindak Pidana: Tinjauan UU Kesehatan Jiwa." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no. 2 (2025).

Wijayanto, Enggar dan Sriharini. 2024. "Krisis Kesehatan Jiwa dalam Dinamika Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 12 (2).

World Health Organization. 2022. World Mental Health Report: Transforming Mental Health for All. Jenewa: WHO Press.

World Health Organization. Mental Health Atlas 2020. Geneva: WHO, 2021.

Yanti, S., Ismail, R., dan Lestari, D. "Peran Keluarga dalam Dukungan Pasien dengan Gangguan Kesehatan Mental." *Jurnal Psikologi* 12, no. 1 (2021).